

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI RABU, 11 DESEMBER 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

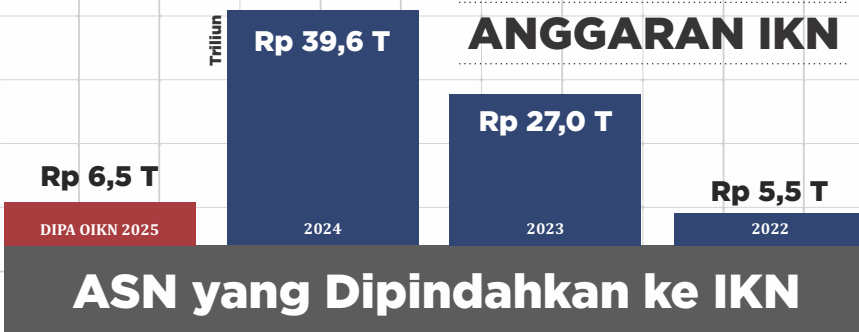
@lenteratoday

lentera.tv

Lentera TV Media

SEKITAR 200 RUMAH DI KEMAYORAN HANGUS TERBAKAR

Sedikitnya 200 rumah semi permanen ludes terbakar dalam kebakaran hebat permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, RW 05 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). Dugaan sementara dipicu ledakan kompor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tapi sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan 7 rukun tetangga (RT) terdampak kebakaran. Kurang lebih 32 unit (mobil damkar) dengan total personel 128 orang dikerahkan untuk memadamkan api. (Antara)



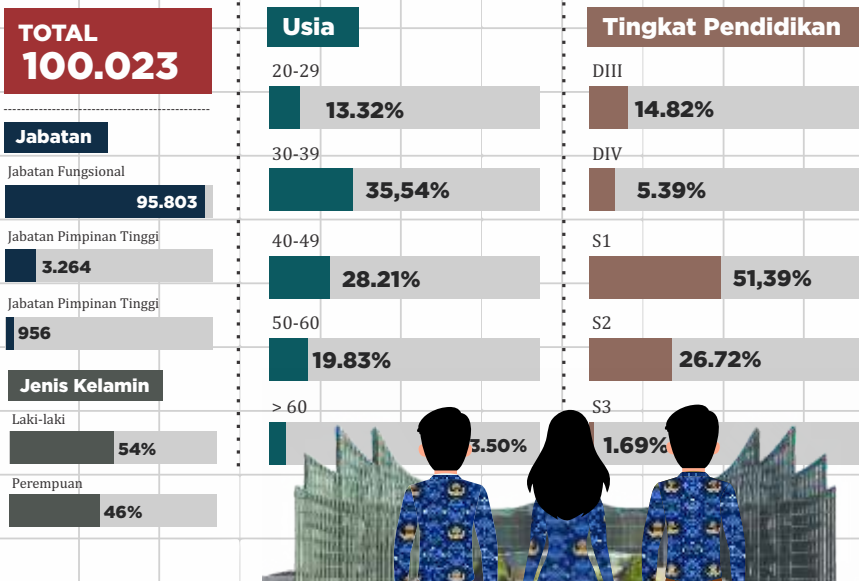
Molor Lagi! Habis Lebaran ASN Pindah IKN

Prabowo Berkantor di Istana Garuda Mulai 17 Agustus 2028

Rencana awalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada Juli 2024, sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara. Kala itu Presiden RI masih diduduki Joko Widodo (Jokowi).

Kini, hingga pucuk pimpinan negara berganti ke tangan Prabowo Subianto, belum ada kepastian kapan para penyelenggara negara mulai bekerja dari Kalimantan Timur (Kaltim). Rencana terbaru, para abdi negara akan dipindah ke IKN pada April 2025, setelah lebaran tahun depan. Sementara Prabowo baru akan berkantor di Istana Garuda pada 17 Agustus 2028. Perpindahan presiden dilakukan ketika semua fasilitas siap. Diketahui, semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto tampaknya belum menginjakkan kakinya kembali di IKN. Namun di sisi lain, terkait pembangunan ibu kota baru tersebut Kementerian Pekerjaan Umum mengakui adanya keterbatasan anggaran. Hal ini memaksa pemerintah mencari tambahan dana melalui berbagai skema, termasuk investasi pihak ketiga.

**Government (Hal.2)
Presiden Optimistis RI Segera Capai Swasembada Energi**



Baca Hal 11....

Presiden Optimistis RI Segera Capai Swasembada Energi

JAKARTA-Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu dari tiga negara di dunia yang bisa mencapai swasembada energi. Dua lainnya adalah Brasil dan Kongo.

"Mungkin hanya tiga negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu tidak lama lagi bisa 100 persen swasembada energi. Dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan, hanya tiga negara, Brasil, Kongo, Indonesia," kata Prabowo Subianto pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Presiden menekankan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi melalui tanaman, dalam hal ini minyak kelapa sawit yang menjadi bahan bakar energi terbarukan.

Menurut Presiden, Indonesia harus pandai memanfaatkan kekayaan alam tersebut, terutama mengingat swasembada energi menjadi prioritas pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian global.

Kepala Negara menilai bahwa selain swasembada energi, swasembada pangan juga menjadi strategi pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan.

"Karena itu selalu swasembada energi dan pangan, saya tegaskan kembali harus kita laksanakan," kata Presiden.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini pemerintah melaksanakan program B35 yang merupakan kebijakan yang mewajibkan pencampuran 35 persen biodiesel ke dalam bahan bakar solar.

Biodiesel ini berasal dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, yang kemudian dicampur dengan solar untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.



Prabowo Subianto saat penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024). (antara)

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemanfaatan bahan bakar nabati untuk mencapai swasembada energi. Beragam upaya lain juga terus dilakukan, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT), percepatan penggunaan kendaraan listrik, dan peningkatan efisiensi energi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga pernah mengungkapkan visinya untuk menjadikan Indonesia mandiri energi dengan swasembada energi. Salah satu yang digencarkan adalah program campuran bahan bakar dengan kelapa sawit atau biodiesel.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024), sempat menyinggung kebutuhan energi di dalam negeri. Ke depan, pemerintahannya akan fokus pada swasembada energi.

Prabowo menegaskan, dalam keadaan ketegangan geopolitik saat ini, yang memungkinkan ada perang di mana-mana, Indonesia harus siap dengan kemungkinan yang paling

buruk, di mana negara lain harus mengamankan kepentingannya sendiri.

Dorong Pemanfaatan Gas

Untuk itu, pemerintah saat ini mempercepat pengembangan lapangan-lapangan gas baru sebagai bagian dari strategi mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung transisi menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

Hal ini disampaikan Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM sekaligus Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dalam webinar bertajuk "Strategi Pemerintah Mempercepat Monetisasi Giant Gas Discovery" yang digelar Resourcesasia.id, Selasa (10/12/2024).

"Pengembangan energi fosil, termasuk gas bumi, akan dipercepat selama masa transisi energi. Gas akan menjadi andalan utama hingga tercapainya NZE," ujar Dadan.

Menurut Dadan, gas bumi memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan batu bara dan minyak. Bahkan, gas dapat menjadi energi bersih jika

menggunakan teknologi carbon capture and storage (CCS). Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ "Proyek-proyek seperti Blok Masela dan Tangguh sudah merencanakan teknologi ini," tambahnya.

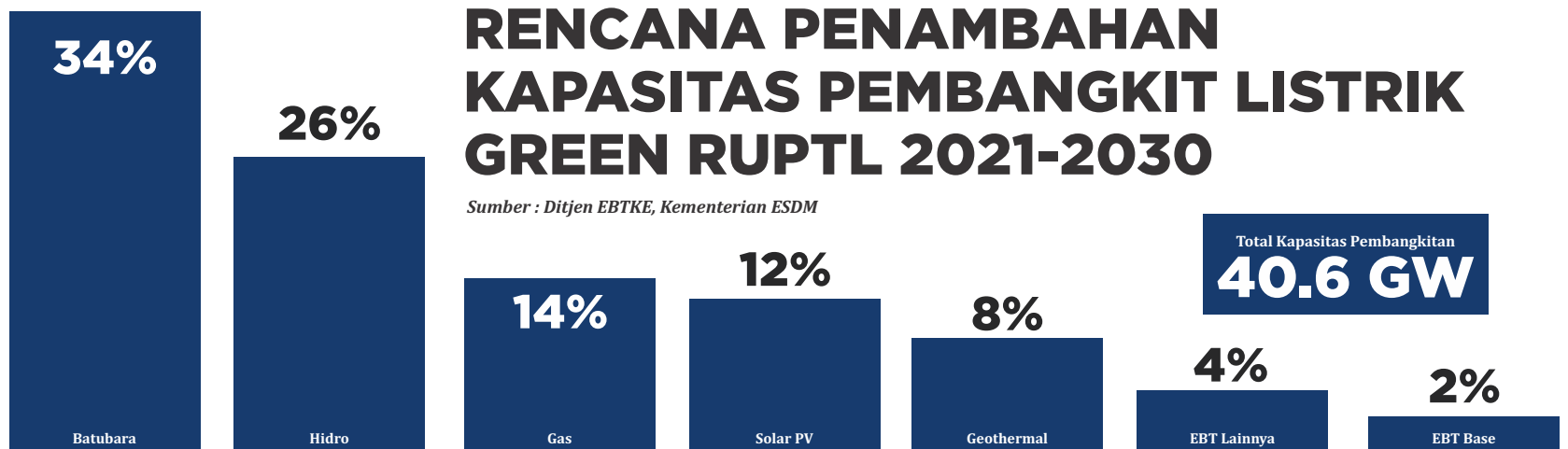
Pemanfaatan gas bumi juga mendukung sektor lain, seperti industri pupuk, rumah tangga, transportasi, dan pembangkit listrik. Dadan menegaskan, gas bumi akan menjadi elemen penting dalam mencapai swasembada energi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk kedaulatan energi dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Sementara, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reformasi Institute, menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh terhadap energi. "Swasembada energi dapat tercapai jika kita memanfaatkan semua potensi energi, baik fosil maupun terbarukan. Jangan ada dikotomi antara energi bersih dan fosil," ujarnya.

Dalam upaya percepatan, Arya Disiyona, Kepala Departemen Pengembangan Lapangan SKK Migas, mengungkapkan bahwa temuan gas di Blok North Galal menjadi contoh percepatan pengembangan lapangan gas. "Temuan ini mendapat persetujuan pengembangan hanya dalam 10 bulan dan diharapkan mulai produksi pada 2027," jelasnya.

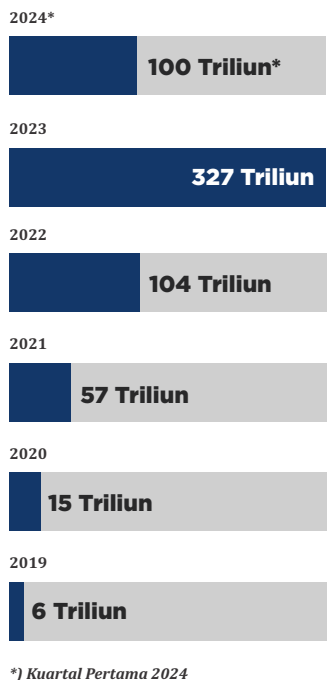
Sementara itu, Dani Jatnika dari PT Pertamina Hulu Energi menuturkan, 40-60 persen gas dari Blok Masela akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik. "PT Pupuk Indonesia akan memanfaatkan 150 mmscfd untuk membangun pabrik pupuk di Masela," ungkapnya.

Dengan strategi ini, pemerintah optimistis memanfaatkan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi impor energi, dan mewujudkan kedaulatan energi Indonesia. (ant wid, rls, ist/dya)



DPR Usul Ada UU dan Badan Khusus Tangani Judi Online

NILAI TRANSAKSI JUDI ONLINE DI INDONESIA



(Ilustrasi) Barang bukti judi online yang disita pihak berwajib. (Dok)

Singapura mengembangkan sistem perjudian yang terintegrasi dan terkontrol sehingga pelaku judi online tidak dapat beroperasi dengan bebas. Pengaturan ketat judi juga dilakukan oleh negara lain.

"Inggris menetapkan UU Perjudian dan memiliki badan pengawas yang disebut Komisi Perjudian," ungkapnya.

Di Indonesia, jerat hukum pelaku judi online masih menyatu dalam UU ITE dan KUHP. Hukumannya memang berat, penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Namun, sejauh ini sanksi hukumnya belum jelas, tidak ada tanda-tanda jera bagi pelaku, dan modusnya justru semakin canggih dengan berbagai macam permainan (games).

Berdasarkan data Londonlovesbusiness.com, hingga kuartal I 2024, transaksi judol di Indonesia mencapai Rp101 triliun atau melebihi APBN 2025 untuk kenaikan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN Rp81,6 triliun. Sedangkan PPATK (Juli 2024) menyampaikan 5 Provinsi pemain judol terbanyak, yakni Jawa Barat 535.644 pemain dengan total transaksi Rp3,8 triliun.

Kemudian, DKI Jakarta 238.568 pemain, transaksi Rp2,3 triliun dan Jawa Tengah 201.963 pemain, transaksi Rp1,3 triliun.

Lalu, menyusul Banten dengan 150.302 pemain, transaksi Rp1,02 triliun serta Jawa Timur dengan 135.227 pemain, transaksi Rp1,05 triliun.

PPATK Diminta Sita Rp 86 T

Menurut data, pada periode 2017-2024, Center for Banking Crisis (CBC) mencatat pendapatan bank, e-wallet dan operator seluler yang memfasilitasi transaksi judi online (judol), yang seharusnya dikembalikan ke negara sekitar Rp86,3 triliun.

Dana tersebut, seharusnya ditarik negara yang bisa digunakan untuk membiayai sejumlah program unggulan pemerintah. "Berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil pendapatan judol di lembaga pembayaran, seperti bank, aplikasi e-wallet atau layanan keuangan digital melalui operator seluler yang bisa menjadi media pembayaran Judol," kata Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Jika PPATK tidak bisa mengambil uang dari transaksi judol di bank, e-wallet maupun operator seluler, kata Ustadz Aboe Bakar, sapaan akrabnya, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Isi Perppu adalah menambah kewenangan PPATK, agar bisa mengambil dana transaksi Judol di lembaga sistem pembayaran resmi, seperti bank, aplikasi e-wallet atau operator seluler," terang Aboe Bakar.

Dengan pemberian kewenangan PPATK itu, kata dia, akan mempercepat pemberantasan judol yang sampai saat ini, belum mampu diatasi. Karena sistem pembayaran tidak bisa offline dengan alasan akan merugikan nasabah lain yang bukan pelaku judol.

"Adanya penarikan dana-dana itu akan memberikan efek jera kepada lembaga penyedia sistem pembayaran yang selama ini terkoneksi dengan merchant judol," terangnya.

Di mana, bank, e-wallet serta operator seluler yang memfasilitasi judol, baik sengaja maupun tidak disengaja diancam penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar, berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat (2)

dan Pasal 45 Ayat (2).

Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp 25 juta bagi pelaku perjudian.

Selain itu, bank dapat kehilangan dana hasil Judol yang dianggap sebagai hak pemerintah, dan pendapatan dari aktivitas ilegal ini akan disita.

"Sanksi ini menegaskan bahwa keterlibatan dalam judol tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa risiko serius bagi reputasi dan operasional bank," papar Aboe Bakar.

Saat ini, berdasarkan data intelijen dari Kemenko Politik dan Keamanan, jumlah masyarakat yang bermain judol sepanjang 2024, mencapai 8,8 juta orang. Sebanyak 80 persen di antaranya adalah masyarakat menengah ke bawah.

"Jadi judol merusak kehidupan masyarakat, baik sosial ekonomi, kesehatan dan mental. Di sisi lain, ada yang menikmati Judol dari sistem transaksi yang melibatkan lembaga pembayaran seperti bank, dan e-wallet," imbuhnya.

Pandangan senada disampaikan Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri. Judol sebagai fenomena global yang berkembang pesat di era digital, menjadi masalah yang mendesak diselesaikan pemerintah.

"Kemudahan sistem pembayaran judol melalui bank, a-wallet dan pulsa meluas karena lemahnya pengawasan perbankan oleh OJK dan pengawasan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia," kata Deni.

Dia bilang, saat ini, koneksi pembayaran melalui API (Application Programming Interface) dari perbankan atau e-wallet ke penyedia sistem pembayaran (PJP), sangatlah mudah. Ini melemahkan E-KYC (Electronic know your costumer) dan E-KYB (Electronic Know Your business).

"Banyak perbankan dan e-wallet yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu adanya koneksi dalam sistem pembayaran di internalnya terkoneksi merchant berbasis judol," ungkapnya.

Deni mengatakan, PJP yang mendapat izin operasi dari BI sesuai PBI No.22/23/PBI/2020 dan PJP yang mendapat izin PSE (penyelenggara sistem elektronik) PP No. 71/2019 dari Menkodigi, banyak yang berevolusi menjadi media transaksi pembayaran dan merchant Judol. Inilah yang menyebabkan judol berkembang pesat. (wid, din, tar, ist, ant/dya)

JAKARTA - DPR RI menilai diperlukan pembuatan undang-undang (UU) dan badan khusus untuk menangani judi online (judol). Sebab kasus tersebut merupakan persoalan yang berstatus kejahatan luar biasa.

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan, jika judol masuk sebagai kejahatan luar biasa maka judol sudah seperti kejahatan lainnya yang perlu penanganan khusus.

"Seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan genosida maka penanganan judol juga membutuhkan khusus" kata Toha dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dia mengungkapkan dampak judol sudah sangat luas, sistematis, dan menimbulkan kerugian yang masif. PPATK menyebut 25 persen pelakunya berusia di bawah 30 tahun (remaja sampai anak-anak).

Maka, legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu menegaskan kejahatan luar biasa juga harus diberantas dengan cara yang luar biasa, seperti pembentukan UU khusus (lex specialis) dan badan khusus.

Selain itu, dirinya mencontohkan

Soal Sertifikasi Pendakwah

Menag: Kami Sedang Rapikan Administrasi Masjid

Negara-negara yang Melakukan Sertifikasi Pendakwah



SINGAPURA menerapkan kebijakan sertifikasi ini. Bagi siapapun yang tidak mempunyai sertifikat (tauliah), meski secara keilmuan dan kualifikasi keulamakannya diakui, tetap tidak bisa memberikan ceramah di muka umum. Mereka tidak bisa memberikan khutbah, ceramah maupun kajian, baik di masjid maupun di tempat terbuka.



MALAYSIA juga melarang penceramah tanpa ada sertifikat dari pemerintah. Selain mewajibkan sertifikasi, ia melanjutkan, pemerintah Malaysia juga menunaikan kewajibannya dengan memberikan honor bulanan kepada para penceramah. Karena itu materi ceramah atau khutbahnya lebih banyak membawa misi pemerintah dan negara.

JAKARTA-Kementerian Agama masih terus mengkaji usulan sertifikasi juru dakwah. Usulan ini sebelumnya disampaikan Komisi VIII DPR RI imbas polemik Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) dengan pedagang es.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Kemenag sudah membenahi administrasi setiap majelis taklim di masjid. Menurutnya dalam waktu dekat angka majelis taklim yang terdaftar di Indonesia bisa diketahui setelah administrasi rampung.

"Nah kami sudah merapikan administrasi masjid ini, data-data yang keislaman ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, rapi administrasinya angka-angka kuantitatif majelis taklim itu bisa kita lihat," kata Nasaruddin Umar usai menghadiri acara pembukaan Festival Harmoni Istiqlal, di Kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2023).

Nasaruddin menceritakan, saat memimpin sebagai Wakil Menteri Agama periode 2011-2014, total majelis taklim di Indonesia ada 250 ribu. Angka tersebut dapat berubah karena saat ini masjid di Indonesia sudah mencapai 800 ribu.

"Waktu (saya menjadi) wakil menteri agama, majelis taklim saja



Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan).

sudah 250 ribu. Bayangkan 800 ribu masjid. Nah setiap masjid itu pasti ada komunitas yang biasa disebut dengan majelis taklim," kata Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.

Kemenag akan mengundang organisasi masyarakat Islam terkait sertifikasi juru dakwah. "Pasti (ormas diundang)," ucap Nasaruddin.

PBNU Sebut Wacana Lama

Terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, usulan sertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama yang sudah dilakukan oleh MUI dan PBNU. Namun, sifatnya belum menjadi kewajiban.

"Sifatnya masih sukarela dan belum menjadi kewajiban karena belum ada aturan pemerintah," kata Fahrur Selasa (10/12/2024).

Fahrur mengatakan, sertifikasi penceramah sebetulnya sudah dilakukan di Malaysia. Pendakwah tidak boleh berceramah tanpa ada sertifikat dari pemerintah. "Bahkan, penceramah (bersertifikasi) di Malaysia mendapatkan gaji tetap setiap bulan dari pemerintah," kata Fahrur.

Berbeda dengan Indonesia, sertifikasi pendakwah masih ada polemik berkaitan dengan hak kebebasan berbicara dan berpendapat yang dilindungi UU.

Fahrur pun menyarankan sertifikasi dapat dimulai pemerintah untuk para da'i pada lingkungan BUMN dan kemenag.

Sertifikasi nanti pun harus obyektif dan tidak boleh menjadi diskriminasi terhadap da'iyang dianggap pemberberangan dengan pemerintah. Sertifikasi sebaiknya dilaksanakan oleh lembaga keagamaan yang kredibel seperti PBNU, MUI dan Muhammadiyah.

Muhammadiyah Nilai Tak Perlu

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana sertifikasi pendakwah yang belakangan muncul perlu dikaji ulang. Bahkan, sambungnya, sebaiknya ditiadakan dan tak perlu direalisasikan.

"Dikaji secara matang, jangan langsung diputus. Bahkan, sebaiknya tidak," kata Haedar di sela menghadiri acara pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Senin (9/12/2024).

Sertifikasi pendakwah ini mencuat setelah kontroversi pendakwah yang

juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman ramai diperbincangkan publik.

Miftah disebut sudah mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah pengajian, kemudian juga viral ketika dia melakukan hal sama terhadap seniwati senior Suyati alias Yati Pesek. Setelah bertubi-tubi tekanan publik, Miftah sudah mengumumkan akan mundur dari jabatan utusan khusus presiden.

Haedar mengatakan, wacana sertifikasi pendakwah itu harus dibahas secara matang lebih dulu. Ia tak mau hal itu direalisasikan secara gegabah hanya karena satu atau dua kasus saja.

"Sebaiknya segala hal dibahas dan diputuskan secara matang jangan karena satu dua kasus, lalu kita pilihannya verbal," ucapnya.

Menurut Haedar daripada sertifikasi pendakwah, hal yang paling penting adalah bagaimana pemuka agama dan elite bangsa Indonesia bisa mencontohkan sifat teladan ke masyarakat.

Bukan, sendirinya, justru membawa agama menjadi bagian konsumsi hiburan atau entertainment.

"Yang paling penting justru baik seluruh elite agama maupun elit bangsa bisa menjadi teladan. Maka karena itu kami berharap bahwa, agama itu bisa menjadi suluh kehidupan, bukan menjadi entertainment dalam kehidupan kita," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq sebelumnya mendorong Kemenag mengadakan sertifikasi juru dakwah. Menurut Maman, hal ini dilakukan agar para pendakwah tak keluar dari nilai-nilai agama dalam dakwahnya.

"Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah," kata Maman Imanulhaq dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

Maman menegaskan, perlu adanya kontrol dari pihak berwenang, yaitu Kementerian Agama dalam mengawasi para juru dakwah. Politikus PKB ini berharap tidak ada juru dakwah yang menodai nilai ajaran agama dalam ceramah-ceramahnya. (din,rls,wid,ant/dya)



Nah kami sudah merapikan administrasi masjid ini, data-data yang keislaman ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, rapi administrasinya angka-angka kuantitatif majelis taklim itu bisa kita lihat,"



Nasaruddin Umar
Menteri Agama

Gugatan Pilkada di MK Capai 218, KPU Bakal Lakukan Konsolidasi

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar konsolidasi untuk menghadapi sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan data yang diperoleh di laman resmi MK, telah ada 221 permohonan sengketa pilkada serentak tingkat kabupaten/kota hingga provinsi yang didaftarkan per Selasa (10/12/2024) pukul 18.57 WIB.

"Kita akan melakukan konsolidasi dengan teman-teman daerah, melakukan penguatan untuk persiapan menghadapi sengketa PHP (perselisihan hasil pilkada)," kata anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Iffa Rosita saat ditemui di Jakarta.

Ia juga mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat koordinasi dengan jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan konsolidasi menjelang sidang sengketa Pilkada 2024.

Rencananya, rapat itu akan diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (12/12/2024) sampai Sabtu (14/12/2024).

Dari total 221 permohonan, 178 permohonan di antaranya merupakan sengketa pemilihan bupati, 41 permohonan sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur. Satu permohonan pemilihan gubernur yang didaftarkan tersebut ialah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan.

Ada dua permohonan yang resmi terdaftar untuk sengketa Pilkada Papua Selatan. Ini sekaligus menjadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK. Sementara, hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa sore, tercatat sebanyak empat permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke Mahkamah.

Di sisi lain, hasil pilkada tingkat kabupaten yang paling banyak digugat adalah Pilkada Kabupaten Dogiyai, Pilkada Kabupaten Raja Ampat, dan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara. MK telah menerima masing-masing tiga gugatan terkait hasil pilkada di kabupaten tersebut.

Pendaftaran sengketa Pilkada 2024 paling lambat tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan perolehan suara hasil pilkada. Setelah permohonan didaftarkan, para pemohon dapat melengkapi maupun

memperbaiki permohonannya, sebelum kemudian Mahkamah mencatat perkara itu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

"Nanti setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh MK. Setelah diregistrasi, nanti para hakim akan menggelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian, nanti menetapkan hari sidangnya," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung IMK, Jakarta.

Suhartoyo mengatakan bahwa sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada dilakukan dengan metode sidang panel. Setiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi. Ketua MK memastikan tidak ada hakim konstitusi di suatu panel yang mengadili perkara yang berpotensi memiliki hubungan kekerabatan dengan hakim tersebut, demi menjaga sidang terbebas dari konflik kepentingan.

Adapun MK hingga saat ini belum menentukan jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024. Menurut Suhartoyo, Mahkamah sedang menerima permohonan sehingga jadwal sidang masih dalam pembahasan. "Kira-kiranya di awal Januari (2025)," kata dia.

Jadwal Pelantikan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua daerah telah menetapkan hasil Pilkada serentak 2024 di daerah masing-masing. Para calon peraih

suara terbanyak akan dilantik pada Februari 2025.

Aturan itu tertuang dalam pasal 22A Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024. Pemerintah akan menggelar dua kali pelantikan kepala daerah serentak.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2025," bunyi pasal 22A ayat (1) Perpres Nomor 80 Tahun 2024.

"Pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025," bunyi ayat berikutnya.

MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada Kabupaten hingga Provinsi

Pelantikan kepala daerah dapat dilaksanakan setelah tanggal itu. Namun, pelantikan tersebut hanya

berlaku dengan tiga kondisi di pasal 2A ayat (3).

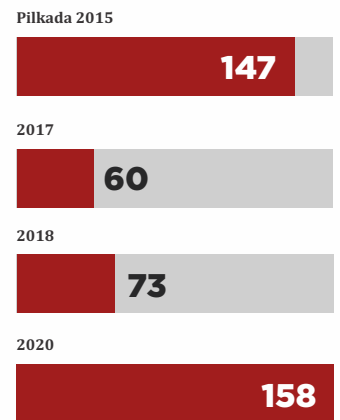
Pertama, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Kedua, putaran kedua untuk Pilgub DKI Jakarta. Ketiga, keadaan memaksa atau force majeure yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan.

Saat ini, para peserta Pilkada 2024 berkesempatan menggugat hasil ke MK. Jika tak ada gugatan di sebuah



Jurnalis tengah memantau permohonan pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024 pada layar monitor secara online di Gedung MK.(Dok)

JUMLAH SENGKETA PILKADA DITANGANI MK (2015-2020)



daerah, maka MK bersurat ke KPU daerah tersebut untuk penetapan pasangan calon terpilih.

Jika ada gugatan, maka MK akan menyidangkan perselisihan tersebut terlebih dulu. Penetapan paslon terpilih dilakukan setelah MK memutus gugatan tersebut.

Hingga pagi tadi, ada sekitar 200 permohonan perselisihan hasil pilkada di situs MK. Deretan permohonan itu belum termasuk gugatan dari daerah-daerah seperti DKI Jakarta dan Sumatera Utara. (din, tar, rls, ant/dya)



“
Kita akan melakukan konsolidasi dengan teman-teman daerah, melakukan penguatan untuk persiapan menghadapi sengketa PHP (perselisihan hasil pilkada),”

Iffa Rosita
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan

DPRD Kota Malang Kritisi Implementasi 'Smart City'

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai konsep 'Smart City' bagi Kota Malang belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Meskipun beberapa sektor telah mengalami digitalisasi, langkah tersebut dinilai masih bersifat

parsial dan belum terintegrasi.

Padahal, konsep Smart City menurutnya tidak hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

"Sekarang ini kan wacananya Kota Malang Smart City, tapi ternyata secara makro itu kita belum sampai di situ. Masih hanya parsial saja, beberapa bagian yang oke, mungkin ada beberapa yang sudah digitalisasi. Tetapi, menurut saya itu masih belum terintegrasi," ujar Amithya, Selasa (10/12/2024).

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini mengatakan, perlunya sistem yang terpusat dan terpadu agar masyarakat dapat lebih mudah memahami program-program pemerintahan, alokasi anggaran, serta mekanisme pelayanan publik.

"Ini mungkin yang harus kita dorong sehingga transparansi itu bisa hadir. Sudah gak perlu pusing-pusing lagi untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menyampaikan program-program pemerintahan Kota Malang, anggarannya sekian, pintu masuk masyarakat itu di A, B, C sampai Z, ada penjelasannya semua," lanjutnya.

Mia juga menggarisbawahi,

m e m b a n g u n
pemerintahan yang
t r a n s p a r a n
memerlukan upaya
kolaboratif antara
legislatif dan
eksekutif. Ia
berharap, ke
depannya terdapat
langkah konkret
untuk mengem-
bangkan konsep e-
government, yang
meliputi berbagai
aspek digitalisasi,
seperti e-budgeting
m a u p u n e-
registration.

Menurut Mia, penerapan sistem e-government akan m e m b e r i k a n berbagai manfaat, tidak hanya dalam hal transparansi anggaran, tetapi juga mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sistem ini juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemantauan yang lebih akurat oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum (APH).



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Santi/Lenteratoday)

Namun, ia mengakui bahwa mewujudkan e-government bukan perkara mudah. Diperlukan kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan sumber daya manusia, serta komitmen dari semua pihak terkait.

Oleh karena itu, Amithya mengajak seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Malang. (Santi/Dya)



Sekarang ini kan wacananya Kota Malang Smart City, tapi ternyata secara makro itu kita belum sampai di situ. Masih hanya parsial saja, beberapa bagian yang oke, mungkin ada beberapa yang sudah digitalisasi. Tetapi, menurut saya itu masih belum terintegrasi,"

**AMITHYA
RATNANGGANI
SIRRADUHITA**
Ketua DPRD Kota Malang

Diharapkan Rutin Digelar,

Program Ngalam Gesit Salurkan Bantuan untuk 300 Warga Pra-sejahtera

Pj Ketua TP-PKK Kota Malang, Septiana Iwan Kurniawan menyerahkan bantuan pendidikan melalui program Ngalam Gesit kepada salah satu penerima manfaat, Selasa (10/12/2024). (Santi/Lenteratoday)



MALANG - Sebanyak 300 warga pra-sejahtera di Kota Malang menerima bantuan sosial melalui program Ngalam Gerakan Sosial Terpadu (Gesit) yang digelar di Balai Kota Malang, Selasa (10/12/2024). Program ini mendapatkan apresiasi dari Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, yang mengharapkan agar kegiatan serupa dapat digelar secara rutin untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Iwan menegaskan, program

Ngalam Gesit ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan berbagai p e m a n g k u kepentingan, termasuk para pelaku usaha yang ada di Kota Malang.

"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran yang terlibat, mulai dari Pak Sekda, OPD Kota Malang, hingga stakeholder seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bank Indonesia (BI) cabang Malang, forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), pelaku usaha seperti Indomaret, RS Hermina, dan seluruh yang terlibat," ujar Iwan, ditemui usai memberikan bantuan secara simbolis.

Dalam acara tersebut, bantuan diberikan secara simbolis kepada 69 warga dari total 300 penerima manfaat yang hadir. Iwan menjelaskan, data penerima bantuan program

Ngalam Gesit di Kota Malang mencapai 810 warga. "Ini acara yang luar biasa, menunjukkan kepedulian yang nyata dan konkret dari pemerintah dan para pelaku usaha terhadap masyarakat pra-sejahtera," tambahnya.

Iwan juga mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, kesuksesan stakeholder yang terlibat khususnya para pelaku usaha, tidak diukur dari banyaknya uang atau tingginya jabatan, melainkan dari kontribusi dalam meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

"Harapan saya kegiatan seperti ini bisa tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya, direncanakan lebih matang lagi, memberikan bantuan lebih banyak lagi untuk bisa diterima oleh masyarakat pra sejahtera. Mudah-mudahan ke depan ini terus dilanjutkan," paparnya.

Lebih lanjut, Iwan menyebut program ini sejalan dengan 3 program strategis pemerintah pusat yang turut menjadi perhatian Pemkot Malang, yaitu penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian inflasi. "Melalui kegiatan

ini, kita memberikan sembako murah, bantuan susu, dan alat pertanian, yang semuanya sangat relevan dengan upaya tersebut," jelasnya.

"Kalau buat saya, Gesit ini hal yang luar biasa, merencanakan program terpadu untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Saya yakin ini akan mengurangi pengeluaran bagi masyarakat pra sejahtera yang menerima," imbuhnya.

Dalam pantauan di lapangan, saat pemberian bantuan berlangsung, suasana haru tak dapat disembunyikan oleh para penerima manfaat. Beberapa di antara mereka terlihat menitiknkan air mata, mengungkapkan betapa besar arti bantuan tersebut bagi kehidupan mereka.

Sebagai informasi, adapun beberapa bantuan yang diberikan meliputi bantuan beasiswa pendidikan, bantuan masyarakat rentan, bantuan alat bantu difabel, bantuan alat pertanian, serta bantuan bedah rumah. Dengan kolaborasi OPD yang terlibat meliputi Dinsos-P3AP2KB, Dinas PUPR-PKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Diskopindag, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan). (Santi/Dya)

YATI PESEK

Sosok Legenda Kesenian Sejak Usia 7 Tahun

SOSOK Yati Pesek, seorang seniman legendaris asal Yogyakarta, kini tengah menjadi sorotan warganet Setelah sebuah video lama yang melibatkan Gus Miftah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Yati menerima hinaan terkait penampilan fisik dan profesinya sebagai sinden dari pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji. Tindakan tersebut memicu kemarahan di kalangan netizen, yang menilai perilaku Miftah tidak pantas bagi seorang pendakwah.

PENGARUH BESAR YATI PESEK DALAM DUNIA SENI

Yati Pesek merupakan nama yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia seni. Sebagai seorang pelaku seni kawakan, kontribusinya sangat signifikan dalam kesenian wayang orang dan ketoprak. Banyak seniman dan budayawan yang mengagumi kemampuan Yati, yang dikenal serba bisa dan telah berpengalaman di berbagai bidang seni.

JEJAK KARIER YATI PESEK

Perjalanan karier Yati Pesek sangat menarik untuk ditelusuri. Dari awal mula hingga saat ini, Yati telah memberikan banyak warna dalam dunia seni pertunjukan. Berikut adalah rangkuman perjalanan karier Yati Pesek yang dihimpun dari berbagai sumber.

Awal Karier: Yati memulai kariernya di dunia seni sejak usia muda, terlibat dalam berbagai pertunjukan lokal.

Puncak Popularitas: Seiring berjalannya waktu, Yati mulai dikenal luas dan menjadi salah satu sinden terkemuka di Yogyakarta.

Kontribusi Seni: Yati tidak hanya berperan sebagai sinden, tetapi juga aktif dalam pengembangan seni tradisional di Indonesia.

Dengan segala pencapaiannya, Yati Pesek tetap menjadi inspirasi bagi banyak generasi seniman di Indonesia. Karya dan dedikasinya dalam dunia seni patut diapresiasi dan terus dikenang.

PROFIL YATI PESEK: SENIMAN TRADISIONAL DARI YOGYAKARTA

Yati Pesek, lahir di Yogyakarta pada 8 Agustus 1952, merupakan sosok yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya dan seni tradisional Indonesia. Sejak masa kecil, Yati telah dibesarkan dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai seni, berkat kedua orang tuanya yang aktif dalam dunia karawitan.

KARIER AWAL SEBAGAI PENARI

Yati memulai kariernya di dunia seni sebagai penari, di mana ia sering kali tampil sebagai pembuka dalam pertunjukan wayang orang yang terkenal di kalangan masyarakat. Keterampilannya dalam menari tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menjadi jembatan untuk memasuki berbagai genre seni

pertunjukan lainnya.

KEAHLIAN DALAM DUNIA SINDEN

Selain menari, Yati juga mengembangkan bakatnya sebagai sinden dalam pertunjukan wayang kulit. Suara vokalnya yang khas dan penampilannya yang berkarakter berhasil mencuri perhatian penonton. Keberadaannya di panggung sering kali disertai dengan nuansa yang menghibur, membuat setiap pertunjukan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

MENJELAJAHI BERBAGAI PERAN

Dalam perjalanan kariernya, Yati Pesek tidak hanya terfokus pada satu peran. Ia menjelajahi berbagai karakter, mulai dari sinden hingga pelawak. Gaya yang autentik dan penggunaan logat serta budaya Jawa menjadikannya sebagai salah satu seniman yang memiliki daya tarik luas. Penampilannya sering kali dipenuhi dengan humor, yang membuatnya dihormati dan dicintai oleh masyarakat seni tradisional.

WARISAN BUDAYA YANG ABADI

Yati Pesek adalah contoh nyata bagaimana seni

tradisional tetap hidup dan berkembang melalui generasi. Melalui dedikasinya, ia tidak hanya menghibur, tetapi juga melestarikan budaya dan seni yang menjadi identitas bangsa.

KARIER CEMERLANG YATI PESEK DALAM DUNIA HIBURAN

Yati Pesek mencapai puncak kariernya setelah bergabung dengan Srimulat, grup lawak legendaris Indonesia. Ia menarik perhatian sutradara Arifin C Noer dengan humor sederhana dalam film Serangan Fajar (1982). Kesuksesannya berlanjut dengan pentas di Taman Ismail Marzuki pada 1986, menjadi pembawa acara budaya, dan bergabung dengan Bagong Kussudiardja dalam program Plesetan. Keberagaman perannya membuktikan Yati sebagai seniman multi-talenta yang berkontribusi besar dalam hiburan Indonesia. (nei,ist/dya)

Sumber Foto: Kapanlagi.com



Sumber Foto: instagram.com/el_bullpawz



Sumber Foto: Youtube/Gus miftah official

PENGASUHAN INNER CHILD

PERAN TUA DALAM MEMBENTUK MASA DEPAN ANAK

MENURUT Laela dan Rohmah (2022), pola asuh orang tua berhubungan erat dengan perkembangan anak, termasuk dalam hal pembentukan inner child. Inner child adalah konsep yang menggambarkan sisi anak-anak yang ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman masa kecil, baik yang baik maupun buruk, yang menetap hingga dewasa dan memengaruhi karakter seseorang.

Melalui artikel ini, kita akan membahas pengertian inner child, kaitannya dengan pola asuh, serta dampaknya di masa depan.

Apa Itu Inner Child?

Inner child adalah sisi diri kita yang membawa ingatan, pengalaman, dan emosi dari masa kecil. Setiap pengalaman baik atau buruk akan membentuk inner child ini. Jika seorang anak tumbuh dengan kasih sayang, inner child mereka akan tumbuh sehat. Sebaliknya, pengalaman negatif seperti kurang perhatian atau tekanan emosional bisa meninggalkan luka yang terbawa hingga dewasa.

Pola Asuh dan Inner Child

Pola asuh memiliki peran besar dalam membentuk inner child anak. Pola asuh yang penuh kasih sayang dan perhatian akan memberikan anak rasa aman, percaya diri, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik. Sebaliknya, pola asuh yang otoriter atau terlalu permisif dapat memicu rasa cemas, rendah diri, atau

bahkan trauma yang tersimpan di inner child mereka. Oleh karena itu, pola asuh yang peduli menjadi kunci penting dalam menyembuhkan dan menjaga kesehatan emosional anak.

Pengaruh Inner Child di Masa Depan

Luka atau kekuatan yang terbentuk di masa kecil akan memengaruhi banyak aspek kehidupan di masa depan, seperti hubungan, pekerjaan, hingga cara seseorang menghadapi tantangan. Anak dengan inner child yang sehat cenderung tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mampu menjalin hubungan yang sehat. Sebaliknya, inner child yang terluka dapat memunculkan masalah seperti ketidakstabilan emosi atau kesulitan berkomunikasi. Memahami pentingnya inner child dan pola asuh yang mendukung adalah investasi besar dalam membentuk generasi yang lebih kuat secara emosional dan mental. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang tidak hanya mendidik, tapi juga menyembuhkan.

Penyebab Inner Child Terluka

1. Kekerasan Fisik dan Psikis

Kekerasan fisik bukan hanya meninggalkan bekas secara kasat mata, tetapi juga tak kasat mata. Lain halnya dengan kekerasan psikis, di mana kekerasan jenis ini seringkali dianggap sepele karena bekasnya tidak terlihat. Mau bagaimana pun, baik kekerasan fisik atau psikis sama-sama berperan besar dalam

trauma yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat membuat inner child seseorang terluka dan berdampak terhadap bagaimana seseorang berperilaku ketika ia dewasa.

2. Bullying atau Perundungan

Bullying berdampak sangat besar terhadap bagaimana seseorang berhubungan dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka yang pernah menjadi korban bullying besar kemungkinan memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi dengan kawan-kawannya. Hal ini bisa terjadi sebab terdapat inner child dalam dirinya yang masih menetap sebagai akibat dari bullying. Ada yang menjadi sangat hati-hati dan selektif dalam memilih teman, ada pula yang kemudian menjadi sulit percaya dengan kosnep pertemanan.

3. Kehilangan Orang Tersayang

Kehilangan sosok terdekat dan tersayang tentunya akan meninggalkan luka begitu mendalam. Dampak dari kepergian tersebut pun tak jarang masih dirasakan oleh mereka yang mengalaminya, bahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Contohnya seperti seorang anak yang sejak kecil sudah ditinggal orang tuanya pergi menghadap Tuhan untuk selama-lamanya. Hal inilah yang kemudian dapat memicu inner child terluka, karena ingatan akan kepergian orang tua anak tersebut terus menetap hingga ia dewasa.

Dampak Jika Inner Child yang Terluka Diabaikan

Semakin diabaikan, maka semakin hal ini akan memberikan dampak negatif. Bagaimanapun, ini merupakan bagian dari diri sendiri yang secara tidak sadar juga membentuk diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Menurut Healthline, inner child justru merupakan sumber kekuatan yang berperan besar dalam perkembangan seseorang hingga menjadi dewasa. Jika inner child terus-menerus diabaikan, hal ini bisa berpotensi membuat seseorang melakukan perbuatan destruktif seperti mudah emosi dan berteriak, melakukan kekerasan, hingga memusuhi diri sendiri.

Cara Menyembuhkan Inner Child yang Terluka

Menerima dan Memahami Trauma Masa Kecil

Tidak semua orang dapat menerima dan memahami trauma masa kecil dengan cepat dan mudah. Terkadang, butuh waktu yang lama untuk bisa sampai pada tahap tersebut. Bahkan, sebagian orang justru akan menolak menerima dan memahami trauma masa kecil yang mereka miliki karena satu dan lain hal. Meskipun begitu, harus selalu diingat bahwa trauma masa kecil tetap merupakan bagian dari diri sendiri, walaupun hal ini meninggalkan pengalaman tidak menyenangkan.

2. Self-care atau Memperhatikan Diri Sendiri

Memperhatikan orang lain memang wajib, tetapi memperhatikan diri sendiri juga tak kalah wajibnya. Semakin Anda memperhatikan, maka semakin inner child yang terluka akan sembuh secara perlahan. Anda akan semakin memahami diri sendiri, hingga akhirnya mengetahui apa saja sebenarnya permasalahan dan alasan di balik trauma yang Anda masih miliki hingga dewasa.

3. Terapi dan Mencari Bantuan Profesional

Jika Anda merasa sudah tidak bisa menyembuhkannya sendiri, meminta bantuan profesional atau terapi adalah pilihan yang tepat. Dengan bantuan profesional, Anda akan mendapatkan arahan maupun solusi yang tepat. (nei,ist/dya)





GOOGLE LUNCURKAN GENCAST

Model AI Canggih untuk Prakiraan Cuaca Akurat

PENTINGNYA prakiraan cuaca tidak bisa dianggap sepele, mengingat cuaca dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Keputusan penting, keselamatan, hingga cara hidup kita semua terpengaruh oleh kondisi cuaca. Dalam era perubahan iklim yang semakin nyata, keakuratan prakiraan cuaca menjadi semakin kritis karena cuaca ekstrem dapat terjadi lebih sering. Namun, saat ini banyak model prakiraan cuaca yang dirasakan masih kurang akurat, khususnya untuk jangka pendek.

Kecerdasan artifisial (AI) adalah strategi baru favorit Google dan inovasi berikutnya yang akan digunakannya adalah prakiraan cuaca. GenCast adalah model pembelajaran mesin yang dilatih menggunakan data cuaca selama 40 tahun, dari 1979 hingga 2018.

Perusahaan ini memperkenalkan GenCast, sebuah "model ensemble AI beresolusi tinggi" yang dijelaskan secara terperinci dalam sebuah makalah yang diterbitkan di Nature.

Dilaporkan Gsmarena pada Jumat (6/12/2024) waktu setempat, prakiraan cuaca yang akurat penting untuk segala hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga kesiapsiagaan bencana dan bahkan energi terbarukan.

Dan GenCast mengalahkan sistem



teratas saat ini, ENS milik ECMWF, dalam prakiraan hingga 25 hari sebelumnya.

ENS merupakan salah satu model prakiraan cuaca terbaik di dunia yang dijalankan oleh European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Penelitian menunjukkan bahwa GenCast ternyata mampu memberikan peringatan dini rata-rata 12 jam lebih awal untuk jalur siklon tropis.

GenCast adalah model difusi, mirip dengan yang mungkin pernah dilihat di generator gambar AI.

Namun, model ini disetel khusus untuk geometri Bumi. Model ini dilatih pada data historis empat dekade dari arsip ECMWF.

Untuk mengujinya, Google melatih GenCast pada data cuaca historis hingga 2018 dan menjalankan 1.320 prakiraan cuaca berbeda untuk 2019

dan membandingkan outputnya dengan ENS dan cuaca aktual.

GenCast lebih akurat daripada ENS dalam 97,2 persen kasus, naik hingga 99,8 persen lebih akurat untuk prakiraan cuaca 36 jam ke depan atau lebih lama.

Dalam sebuah demo, Google menugaskan GenCast untuk memperkirakan jalur Topan Hagibis, yang melanda Jepang pada 2019.

Publik dapat melihat jalur yang diambil topan tersebut berwarna merah, sedangkan jalur yang mungkin diprediksi oleh model AI Google berwarna biru.

Pada hari ke-7, topan-topan tersebut menyebar cukup jauh, tetapi semakin menyempit di jalur sebenarnya saat topan semakin dekat ke daratan.

Inovasi ini dinilai memberikan waktu lebih banyak kepada

pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi cuaca buruk sebagai salah satu contoh kasusnya.

GenCast juga dapat memprediksi kecepatan angin di dekat ladang angin, cuaca di atas ladang surya, dan sebagainya.

GenCast adalah "model ansambel", yang berarti menghasilkan 50+ prediksi dengan probabilitas yang berbeda.

Menurut Google, salah satu prediksi tersebut yang mencakup prakiraan cuaca selama 15 hari dapat dibuat dalam 8 menit di Google

Cloud TPU v5.

Beberapa prediksi dapat dilakukan secara paralel. Sementara itu, model prakiraan cuaca tradisional membutuhkan waktu berjam-jam di komputer super.

Google merilis GenCast sebagai model terbuka dan membagikan kode dan bobotnya.

Perusahaan berencana untuk terus bekerja sama dengan lembaga prakiraan cuaca dan ilmuwan untuk membuat prakiraan cuaca di masa mendatang menjadi lebih baik.

Model AI terbaru ini diharapkan tidak hanya membawa kemajuan dalam prakiraan cuaca dunia, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas dalam perencanaan bencana, pertanian, dan berbagai sektor lain yang bergantung pada data cuaca yang akurat. (nei,ist/dya)





Tips Menumbuhkan Rambut Secara Alami

RAMBUT ialah salah satu elemen dalam tubuh kita yang memiliki fungsi penting dalam menjaga penampilan. Terlebih lagi kepada mereka yang porsi kerjanya harus selalu menampilkan kerapian dan looking good setiap saat karena harus selalu bertemu dengan banyak klien. Rambut indah dan rapi adalah impian banyak orang, namun masalah seperti pertumbuhan tidak merata dan kerontokan yang menyebabkan kebotakan di area tertentu sering kali menjadi kendala.

Kebotakan di area tertentu ini memiliki banyak sekali faktor penyebabnya, mulai dari pola hidup yang tidak sehat, hasil alami dari bawaan gen, ataupun memang penggunaan kandungan sampo yang selama ini salah. Hal tersebut merujuk pada krisis percaya diri, sehingga mengharuskan kamu untuk menutupi area botak tersebut dengan wig ataupun menutupinya dengan sisi rambut yang lain.

Namun, kamu tak perlu khawatir, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu coba untuk mengatasi kebotakan secara alami dengan bahan-bahan natural tentunya. Yuk, simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Lidah Buaya

Lidah buaya pada umumnya memang merupakan bahan alami yang paling dikenal sejak dahulu mengenai

performanya dalam perawatan rambut. Bagaimana tidak? dari kandungan yang terpilih memang terbukti mampu menjaga kesehatan rambut kamu layaknya, kalsium, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A & B1 serta fosfor.

Sejak lama, lidah buaya telah mampu membuktikan bahwa dirinya memang sangat berkhasiat untuk perawatan rambut, mulai dari menghitamkan, menghaluskan, menyehatkan, dan tak kalah penting tentunya menyuburkan.

Dalam penggunaannya pun tergolong cukup mudah, dikarenakan tekstur gel yang ada pada lidah buaya sangat efektif untuk disajikan dalam bentuk apa saja seperti, masker, tekstur layaknya krim pasta, ataupun langsung memakainya tanpa mengubah tekstur di dalamnya.

Kamu hanya perlu ambil satu saja tangkai lidah buaya, setelahnya belah menjadi dua agar kamu bisa mendapatkan gel yang sangat bermanfaat di dalamnya. Lalu, tinggal usapkan saja gel tersebut ke seluruh bagian rambut, diamkan selama 30 menit dan bilas dengan air bersih.

Seledri

Tak hanya sebagai bahan pelengkap dalam masakan, si kecil berwarna hijau ini nyatanya juga mampu mendukung kamu untuk merawat dan menumbuhkan rambut

kembali. Siapa yang menyangka, bahwa tanaman seledri ini memiliki kandungan mineral natrium, vitamin A & B yang mampu merangsang pertumbuhan rambut dengan cepat.

Kamu hanya perlu haluskan daun seledri, campurkan dengan sedikit air bersih, lalu oleskan adonan tersebut ke rambut serta kulit kepala secara merata, diamkan kurang lebih selama 45 menit hingga 1 jam agar kandungan di dalamnya dapat bekerja secara maksimal, dan terakhir kamu hanya tinggal bilas dengan air bersih tanpa menggunakan sampo.

Jeruk Nipis

Walaupun rasanya sangat masam, jeruk berukuran kecil satu ini mampu menumbuhkan rambut dengan cepat. Kandungan vitamin C di dalamnya mampu merangsang pertumbuhan rambut kembali libat seperti sedia kala.

Tak hanya itu, ketombe yang membandel pun dapat tersapu bersih dengan sentuhan jeruk yang rasanya masam satu ini.

Cara pemakaiannya pun juga sangat mudah, kamu hanya perlu mengambil beberapa tetes jeruk nipis lalu campur dengan sedikit air bersih. Tak lama, langsung saja oleskan pada rambut dan kulit kepalamu secara merata, terutama pada area yang botak. Diamkan beberapa saat lalu bilas dengan air sampai bersih.

Teh Hijau

Siapa yang menyangka bahan yang biasanya hanya dibuat sebagai sajian minuman hangat di pagi hari ini, nyatanya memiliki manfaat untuk pertumbuhan rambut? Teh hijau yang sering kita jumpai sebagai minuman hangat di kala hujan datang, nyatanya memiliki kandungan yang kaya akan antioksidan dan obat yang sempurna untuk rambut rontok yang disebabkan oleh radikal bebas. Kandungan di dalamnya seperti katekin ini mampu menekan DHT atau dehidrotestosteron yang menjadi penyebab utama kerontokan terjadi.

Kamu hanya perlu 1 kuning telur dan 2 sendok teh teh hijau sampai tekstur menjadi krim pasta. Setelahnya oleskan krim tersebut ke rambut sampai akar dan kulit kepala menggunakan kuas. Diamkan selama 20 menit, lalu bilas dengan air dingin sampai bersih.

Alpukat

Buah satu ini pada umumnya telah dikenal akan performanya di perawatan tubuh baik dalam maupun luar.

Alpukat memang salah satu buah dengan sebutan 1000 manfaat, bagaimana tidak? selain mengonsumsinya dalam salad yang bermanfaat bagi kesehatan (nei,ist/dya)

Molor Lagi! ... (dari Hal 1)

RENCANA pemindahan aparat sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) Nusantara lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

Padahal, update terakhir saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

"Menurut Menteri PANRB (Rini Widiantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD," pungkasnya.

Ini bukan pertama kali pemerintah memundurkan jadwal kepindahan ASN ke IKN. Terakhir, Menteri PANRB di era Presiden ke-7 Jokowi, Abdullah Azwar Anas, mengaku diperintahkan Jokowi untuk memindahkan ASN pada Januari 2025.

"Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN," kata Anas awal Oktober 2023.

Salah satu alasan utama kepindahan ASN mundur adalah penyempurnaan ekosistem dari kantor hingga hunian.

Pemindahan itu molor dari target sebelumnya, yakni pada September 2024, tetapi ternyata hingga Oktober tak juga terealisasi.

Rencana awalnya, pemerintahan Jokowi menargetkan ASN pindah ke IKN pada Juli 2024 atau sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara.

Target waktu itupun mundur ke September 2024, meleset lagi jadi Januari 2025 kemudian kini menjadi April 2025.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN)

Nusantara, Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2028.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menyebutkan, Prabowo baru akan pindah ke IKN setelah ibu kota baru itu dapat memerankan fungsinya sebagai ibu kota politik dengan adanya kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Hasan pun menyatakan, pembangunan IKN hingga saat ini akan terus dilanjutkan sehingga target menjadi ibu kota politik bakal terealisasi pada tahun 2028. "Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," jelas Hasan.

Hal senada disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Ia menuturkan saat ini prioritas pembangunan di IKN kini difokuskan pada infrastruktur inti untuk kebutuhan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029," ujar Dody belum lama ini.

Meski demikian, Dody mengakui target penyelesaian pembangunan IKN secara keseluruhan akan mengalami kemunduran.

Salah satu penyebabnya, kata Dody, adalah keterbatasan anggaran yang memaksa pemerintah mencari tambahan dana melalui berbagai skema, termasuk investasi pihak ketiga.

"On track 100 persen (target pembangunan) ya pasti enggak lah, duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan pembangunan IKN). Kalau ada yang mau bangun (investasi), ya kita dengan senang hati," katanya.

"Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan pembangunan IKN). Kalau ada yang mau bangunnya (investasi), ya kita dengan senang hati, gitu," sambungnya.

Selain anggaran, Dody mengungkapkan ada pergeseran prioritas program dari Presiden Prabowo. Ia menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada pangan.

Ia menekankan pergeseran prioritas ini bakal membuat penyelesaian proyek IKN molor. Meski demikian, Dody membantah pembangunannya berjalan lambat.

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapan DPR

mengikuti apa pun keputusan pemerintah, termasuk pemindahan gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Puan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan mulai berkantor di IKN pada 2028.

"Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan," ujar Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Setelah itu, Puan ditanya apakah DPR sudah menyiapkan gedung di IKN atau belum. Namun, Puan lagi-lagi menegaskan kesiapan DPR untuk mengikuti arahan pemerintah, termasuk jika diminta menyiapkan gedung DPR di IKN.

"Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah," tegas Ketua DPP PDI-P ini.

Puan lantas mengaku dirinya setelah ini akan menuju Istana Negara, Jakarta. Namun apa maksud dan tujuan tersebut, tidak diinformasikan olehnya. "Ya lihat ntar jadwalnya," kata dia.

Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 T

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono membantah proyek pembangunan IKN Nusantara bakal molor di era Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan tak ada perlambatan signifikan dalam pengerjaan proyek IKN. Pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana meski Prabowo juga memprioritaskan program swasembada pangan.

Namun, Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025. Basuki tengah mengusulkannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Usulan tambahan anggaran itu, kata Basuki, diperlukan untuk mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur. "Infrastruktur yudikatif dan legislatif," katanya saat ditemui wartawan di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Sementara ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 ditetapkan senilai Rp 6,3 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memang memerintahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembangunan infrastruktur eksekutif sudah dilaksanakan. Sementara, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif ditargetkan menyusul mulai tahun depan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan lelang proyek pembangunan infrastruktur legislative dan yudikatif ditargetkan pada kuartal I 2025. "Tapi kan masih

menunggu review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)" kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat, 6 Desember 2024

Seperti Basuki, Dody juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Ia menyampaikan hal ini dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Selasa, 3 Desember 2024,

Dalam paparannya, Dody merinci anggaran tersebut bakal digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek. Sedangkan Rp 4.969,63 miliar bakal digunakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik. Target pembangunan ini bukan sekadar penyelesaian pembangunan kantor untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi mencakup fasilitas pendukung perumahan untuk para aparat sipil negara (ASN).

"Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru," ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 8 November 2024. "Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo." (wid, din, ist, rls, ant/dya)

Permintaan Tambahan Anggaran IKN

- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono
- Meminta tambahan anggaran Rp 8,1 triliun, diperlukan untuk mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif.
- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan tambahan anggaran Rp 14,87 triliun. Rincian Penggunaannya:
 - Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9,900 untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek.
 - Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp 4,969,63 miliar untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Buntut Penetapan Darurat Militer

Presiden Korsel Resmi Tersangka Pengkhianatan Negara

SEOUL- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa negara. Dugaan yang dituduhkan adalah pengkhianatan terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan ini, Yoon terancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati jika dinyatakan bersalah.

Jaksa Korsel menetapkan Yoon sebagai tersangka dalam penyelidikan yang meluas terkait penetapan darurat militer sepihak yang diterapkan sang presiden tiba-tiba pada 3 Desember lalu.

Dalam konferensi pers Minggu (8/12/2024), Kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun menyatakan bahwa penyelidikan telah dimulai sesuai prosedur setelah banyak pengaduan diajukan terhadap Yoon.

"Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan," kata Park seperti dikutip The Korea Times.

Dari pengaduan ini, Park menuturkan timnya akan membuka penyelidikan terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Pada dasarnya, kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum," ujar Park.

Tuduhan pengkhianatan terhadap Yoon tidak dilindungi oleh kekebalan konstitusional yang dimiliki presiden, sehingga penyelidikan dapat dilanjutkan terlepas dari hasil pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu.

Jaksa juga telah lebih dulu menahan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan pada Minggu pagi.

Ia ditangkap sekitar enam jam setelah secara sukarela hadir untuk pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pukul 01.30 dini hari. Setelah pemeriksaan awal, jaksa menemukannya dalam tahanan, menyita ponselnya, serta menggeledah kediaman resmi dan kantor lamanya.

Kim dituduh sebagai otak di balik seluruh drama darurat militer sepihak yang diterapkan presiden ini.

Jaksa menilai tuduhan pengkhianatan yang dilakukan Kim sebagai kejahatan serius, sehingga penahanan darurat diperlukan karena ada kekhawatiran akan kemungkinan penghilangan barang bukti.

Kim dipindahkan ke pusat tahanan di timur Seoul. Jaksa diharuskan



Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meminta maaf atas ketidaknyamanan kebijakan darurat militer namun menolak mundur dari jabatannya. (X @AFP)

memperoleh surat perintah penangkapan resmi dari pengadilan dalam waktu 48 jam setelah penahanan tersebut.

Kejaksaan juga memperoleh surat perintah pengadilan untuk mengamankan catatan telepon Kim, dengan spesifikasi tuduhan pengkhianatan serta pemberontakan berdasarkan hukum pidana militer.

Kim, yang merupakan orang dekat Yoon dan teman sekolahnya di SMA Chungam, diduga mengusulkan deklarasi hukum militer dan memainkan peran penting dalam merancang rencana tersebut bersama presiden.

Jaksa sedang menyelidiki keterlibatannya dalam deklarasi hukum militer oleh presiden, pencabutannya, serta pengarahan pasukan bersenjata ke Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Nasional.

Imbas drama darurat militer ini, parlemen Korsel melakukan rapat untuk mengusulkan pengunduran diri Yoon dari kursi presiden. Namun, Yoon akhirnya selamat dari rencana pemakzulan karena usulan parlemen Korsel untuk memakzulkannya tidak disetujui oleh sebagian besar anggota parlemen.

Terindikasi Mundur

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan menyerahkan urusan negara ke partai imbas penetapan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu.

Partai berkuasa, People Power Party (PPP), mengatakan Yoon dibebastugaskan sampai sang presiden mengundurkan diri secara resmi.

Ketua PPP, Han Dong Hoon, menjamin Yoon akan mengundurkan diri secara sukarela, mengutip pernyataan terakhir sang presiden pada Sabtu (7/12/2024).

Dalam permintaan maaf publiknya itu, Yoon mengatakan menyerahkan segala urusan negara, termasuk nasib pemerintahannya, kepada partai

berkuasa.

"Itu (pernyataan Yoon) berarti janji virtual untuk mengundurkan diri," ucap Han seperti dikutip Korea Times.

"Untuk meminimalisir kebingungan, kami akan mendorongnya mengundurkan diri. Sampai waktu pengunduran diri, presiden akan dibebastugaskan dari tugas dan perdana menteri akan berkonsultasi dengan partai untuk memastikan urusan negara tetap berjalan tanpa terganggu," kata Han menambahkan.

Han juga mengatakan akan membicarakan nasib pemerintahan dengan blok oposisi di parlemen. Keputusan ini diambil setelah Yoon lolos mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu.

Sementara itu, jaksa juga telah lebih dulu menahan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan pada Minggu pagi.

Ia ditangkap sekitar enam jam setelah secara sukarela hadir untuk pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pukul 01.30 dini hari. Setelah pemeriksaan awal, jaksa menemukannya dalam tahanan, menyita ponselnya, serta menggeledah kediaman resmi dan kantor lamanya.

Kim dituduh sebagai otak di balik seluruh drama darurat militer sepihak yang diterapkan presiden ini.

Kim, yang merupakan orang dekat Yoon dan teman sekolahnya di SMA Chungam, diduga mengusulkan deklarasi hukum militer dan memainkan peran penting dalam merancang rencana tersebut bersama presiden.

Partai berkuasa People Power Party (PPP) menyatakan sedang membahas pengunduran diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol usai drama darurat militer.

Ketua satgas yang mengurus pengunduran diri presiden, Lee Yang Soo, mengatakan tim mengusulkan Yoon untuk mundur pada Februari atau Maret 2025.

6 JAM DARURAT MILITER DI KOREA SELATAN

Deklarasi Darurat Militer (3 Desember 2024)

- **Sejarah:** Pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade
- **Durasi:** Hanya berlangsung 6 jam.
- **Latar Belakang:** Terjadi di tengah pertikaian mengenai undang-undang anggaran di parlemen.

Pencabutan Darurat Militer

- **TEKANAN:** Dibatalkan setelah tekanan besar dari parlemen dan masyarakat internasional.

Dampak Ekonomi

- **FLUKTUASI PASAR KEUANGAN:** Nilai tukar won Koreamelemah, KOSPI turun lebih dari 2%, sebelum pulih.

Reaksi Politik

- **Parlemen:** 190 anggota parlemen menentang darurat militer.
- **Mosi Pemakzulan:** Oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon.
- **Pengunduran Diri Pejabat:** Beberapa pejabat mengundurkan diri sebagai protes.

Tim yang dibentuk PPP pada 9 Desember itu juga mengusulkan pemilu digelar pada April, dua bulan usai Yoon mundur.

Dalam aturan Korsel, mereka harus menggelar pemilu dalam waktu 60 hari usai presiden mundur.

"Kami belum mencapai kesimpulan di seluruh partai dan akan mengadakan pertemuan lagi dengan semua anggota Parlemen pada sore hari untuk membahas rencana itu," kata Lee ke awak media pada Selasa (10/12/2024), dikutip Reuters. (afp, ist, ant/dya)